



පිළිගිණු උපාධිකාරී තාමි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
දිස්ත්‍රික් ක්ෂේත්‍ර මණ්ඩල විකිණික

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

රජයේ සේවයක් ලෙසින් සේවය කරන - තාමි (පිළිගිණු) උපාධිකාරී (විකිණික) විකිණික
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361), 223562
WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

Bali, 19 Maret 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistika
di –
Denpasar

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.26.000/966/Sekret/Diskelkan

NO.	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2025 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, sesuai permintaan pada surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor : B.14.500.12.18.1/1797/IKP/D.KOMINFOS , Tanggal 06 Maret 2025	1 (satu) gabung	Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670714 199403 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361), 223562
WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id



3.	Visi dan Misi	Memuat Informasi tentang Visi dan Misi Provinsi Bali	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2025	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/visi-misi
4.	Tugas Pokok dan Fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2023	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/tugas-dan-fungsi
5.	Maklumat Pelayanan	Memuat informasi tentang maklumat pelayanan publik yang telah disahkan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	Tahunan	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/maklumat-dan-standar-pelayanan
6.	Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional	Memuat informasi tentang nama-nama pejabat dan pegawai	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	2025	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/struktur-organisasi
7.	Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	Memuat tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas kelautan dan Perikanan	Sekretariat	Fungsional Perencana	2024	√	√	2 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala
8.	Dokumen Rencana Kerja (Renja)	Memuat tentang Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan	√	√	1 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala
9.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memuat tentang pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah selama satu tahun, mencakup pencapaian sasaran strategis dan perbandingan antara rencana dan hasil	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan	√	√	1 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



10.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Memuat tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan	√	√	1 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala
11.	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Memuat tentang capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan	√	√	1 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala
12.	Neraca, CALK, & LRA	Memuat tentang informasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah di audit	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tahunan		√	1 Tahun	https://diskelkann.baliprov.go.id/wajib-berkala
13.	Standar Pelayanan	Memuat informasi tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	2025	√	√	Aktif	https://diskelkann.baliprov.go.id/maklumat-dan-standar-pelayanan


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Putu Sumardiana, MP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670714 199403 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





පිළිගිණු උපාපිණි තාපි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලය

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

රජයේ පාලන ආයතන - තාපි (පිහිටීම) උපාපිණි (පිහිටීම) 1999
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361), 223562
WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
TAHUN 2025

No.	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak Terbatas	Menghambat Proses Pengambilan Keputusan/Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak Terbatas	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



3.	Semua Data, Surat-Surat, Laporan, Penelitian, dan Dokumen Lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau di dokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak Terbatas	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
4.	Arsip/dokumen berupa Nota Dinas dan Memo Pimpinan yang bersifat sangat rahasia atau terbatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak Terbatas	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
5.	Data Kesehatan, Keluarga, Rekening, Tabungan, Pinjaman Pegawai, Hak Kekayaan Pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat 3.c informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak Terbatas	Bocornya Informasi yang Berkaitan dengan Informasi Pribadi sehingga Berpotensi Dapat Disalahgunakan	Menjaga Informasi yang Berkaitan dengan Informasi Pribadi untuk Keamanan Bersama
6.	Identitas Informan, Pelaporan, dan/atau saksi, yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a informasi yang menghambat proses penegakan hukum	Tidak Terbatas	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Mengamankan Proses Penegakan Hukum

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670714 199403 1 003



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe

